



HARIAN LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

Edisi Selasa, 22 Agustus 2023

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat
12 Halaman
download edisi digital
www.lenteratoday.com
**VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021**

www.lenteratoday.com

@lenteratoday

f lentera.tv

@lenteratoday

TV Media

LenteraPodcast

@lenteratoday

MEGAWATI KE JOKOWI: UDAH DEH BUBARIN AJA KPK

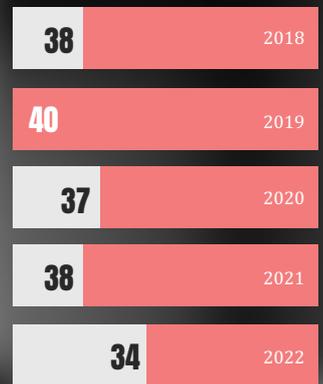


**5 PROVINSI DENGAN JUMLAH
LAPORAN KASUS DUGAAN KORUPSI TERBANYAK
YANG DITERIMA KPK (JANUARI-JUNI 2023)**

DKI Jakarta	359
Jawa Barat	266
Jawa Timur	213
Sumatera Utara	202
Jawa Tengah	135



INDEKS PERSEPSI KORUPSI INDONESIA (2018-2022)



SUMBER:
TRANSPARENCY
INTERNASIONAL

**Government (Hal.2)
Tak Lagi Gratisan,
Vaksin Covid-19
Berbayar
Mulai 2024**

Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri pernah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) itu menuturkan bahwa lembaga independen antirasuah ini dinilai tak lagi efektif dalam menjalankan tugasnya. Kritik terhadap lembaga yang kini dipimpin Firli Bahuri tersebut bukan kali pertama dilontarkan pejabat negeri ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinv) Luhut Binsar Panjaitan bahkan sudah berkali-kali mengatakan operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK acap tak membuat orang jera. Meski KPK gencar melakukan penindakan, buktinya angka korupsi di Indonesia dinilai masih tetap tinggi. Menko Polhukam Mahfud MD pun membenarkan makin 'gilanya' korupsi saat ini. Saking parahnyanya, sebelum Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dibentuk, lobi-lobi hingga tawar-menawar sudah lumrah terjadi.

(Baca Hal 11)

Tak Lagi Gratisan, Vaksin Covid-19 Berbayar Mulai 2024

JAKARTA - Memasuki masa endemi Covid-19, program vaksinasi gratis akan berakhir pada 31 Desember 2023. Artinya, bagi masyarakat yang mau mendapatkan vaksin corona harus berbayar mulai 1 Januari 2024.

"Kebijakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tetap dilanjutkan sampai 31 Desember 2023. Ini juga menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden bahwa untuk kebijakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kita tetap berjalan, berlanjut sampai Desember 2023," papar Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Indah Febrianti, dalam konferensi pers daring, Senin (21/8/2023).

"Nanti setelah Desember 2023, yakni 1 Januari 2024, itu sudah berlaku imunisasi program yang mengikuti ketentuan peraturan Menteri Kesehatan tentang imunisasi, tetapi sampai desember 2023 masih menggunakan regulasi terkait vaksinasi Covid-19 yang telah ditetapkan," lanjutnya.

Indah mengatakan, Pemerintah Indonesia telah menyediakan sejumlah vaksin Covid-19 halal untuk pelaksanaan program vaksinasi hingga Desember 2023 ini, yakni vaksin Indovac dan Inavac. Ia menyebutkan, stok vaksin aman hingga akhir Desember 2023 mendatang.

"Pemerintah telah menyediakan vaksin halal, dalam hal ini Indovac dan Inavac yang memang sudah cukup nanti untuk bisa digunakan sampai akhir Desember 2023," kata Indah.

Dalam kesempatan yang sama, Kemenkes menegaskan bahwa vaksinasi Covid-19 untuk kelompok berisiko tinggi dan lanjut usia (lansia) akan tetap gratis meskipun telah masuk ke dalam Program Imunisasi Nasional mulai 1 Januari 2024 mendatang.

Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes, dr. Prima Yosephine, mengatakan bahwa kebijakan vaksinasi Covid-19 sebagai Program Imunisasi Nasional mulai 2024 tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Covid-19 di Masa Endemi.

"Dalam Permenkes Nomor 23 Tahun 2023, kalau masuk ke dalam imunisasi rutin, tidak berbayar alias gratis. Namun, kalau masuk ke [imunisasi] pilihan akan berbayar," ujar dr. Prima.

Prima mengatakan, Kemenkes telah menetapkan dua kelompok yang berhak memperoleh imunisasi Covid-19 gratis mulai 1 Januari 2024 berdasarkan rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Yaitu Masyarakat berisiko tinggi dan Masyarakat yang memerlukan perhatian. Prima menyebutkan, dosis imunisasi Covid-19 yang



Pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit Inggris naik 40,7% akibat varian baru. (dok.mirror)

diberikan adalah imunisasi primer dan booster hingga dosis kedua.

Sementara itu, vaksin Covid-19 untuk masyarakat non-kelompok berisiko dipastikan bakal berbayar. Namun, biaya sekaligus mekanisme terkait masih belum ditetapkan. Prima mengatakan, kedua hal tersebut akan diatur dalam petunjuk teknis (juknis) segera. "Berapa harganya, berapa biayanya, kami belum menetapkan. Nanti akan diputuskan lagi berapa harga vaksin yang masuk dalam imunisasi pilihan. Mulainya memang 1 Januari 2024," tegas Prima.

40 Persen Subvarian EG.2 dan EG.5

Di sisi lain, Kemenkes melaporkan subvarian Virus Corona terbaru EG.2 dan EG.5 menempati hampir separuh proporsi kasus Covid-19 di Indonesia saat ini. "Dari temuan Whole Genome Sequencing (WGS), proporsi saat ini EG.2 mencapai 20 persen, EG.5 mencapai 20 persen," kata Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan Achmad

Farchanny dalam Konferensi Pers Upaya Penanggulangan Covid-19 di masa endemi diikuti dari Jakarta, Senin (21/8/2023).

Laporan itu diterima Kemenkes pada 7 Agustus 2023. Laporan berdasarkan hasil laporan Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAIID) sebagai institusi yang dibuat oleh Pemerintah Jerman dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Internasional untuk mempelajari data genetika virus.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Rabu (9/8/2023) mengklasifikasikan subvarian virus corona terbaru EG.5 sebagai variant of interest (VOI). Varian virus corona terbaru ini telah menyebar dengan cepat di wilayah Amerika Serikat (AS), dan mencakup lebih dari 17 persen kasus infeksi baru.

WHO menyatakan, varian corona EG.5 saat ini belum menimbulkan risiko tambahan pada kesehatan masyarakat, jika dibandingkan dengan

varian Covid-19 lainnya. Farchanny mengatakan, tren kasus Covid-19 secara nasional sejak 1 Juli 2023 terbilang landai dengan laju positifity rate sebesar 0,31 persen dan tren hospitalisasi serta kematian yang hampir menyentuh angka nol. "Pada 2023 tercatat peningkatan kasus pada Mei dan bulan berikutnya menurun secara signifikan," katanya.

Kondisi Covid-19 di Indonesia yang cenderung stabil dipengaruhi program vaksinasi. Saat ini vaksinasi tercatat lebih dari 453 juta dosis telah disuntikkan kepada penerima manfaat. Lebih dari 64 persen total populasi Indonesia telah menerima vaksinasi dosis lengkap.

Dari hasil serosurvei antibodi yang telah dilaksanakan sebanyak tiga kali di Indonesia sejak 2021 sampai Januari 2023, kata Farchanny, menunjukkan hampir semua penduduk Indonesia punya antibodi Sars-CoV-2. "Pada Januari 2023 Serosurvei terakhir tercatat 99 persen dengan range antara 98,6 sampai 99,3 persen," katanya. (wid,rls,ant/dya)

2 KELOMPOK BERHAK VAKSIN COVID-19 GRATIS PER 1 JANUARI 2024

1. Masyarakat berisiko tinggi dengan kematian dan penyakit akibat infeksi Covid-19, seperti lansia serta dewasa muda dengan komorbid dan obesitas berat

2. Masyarakat yang memerlukan perhatian, yakni usia dewasa, remaja usia 12 tahun keatas dengan immunocompromised sedang sampai berat, wanita hamil, dan tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan

10 PROVINSI DENGAN JUMLAH KASUS KONFIRMASI CORONA TERTINGGI DI INDONESIA (DATA 21 AGUSTUS 2023)

1. DKI Jakarta,	1.568.224 terkonfirmasi,	16.100 meninggal,	1.551.940 sembuh.
2. Jawa Barat,	1.251.851 terkonfirmasi,	16.190 meninggal,	1.232.195 sembuh.
3. Jawa Tengah,	662.346 terkonfirmasi,	34.299 meninggal,	627.112 sembuh.
4. Jawa Timur,	648.307 terkonfirmasi,	32.517 meninggal,	614.453 sembuh.
5. Banten,	372.262 terkonfirmasi,	2.994 meninggal,	368.944 sembuh.
6. DI Yogyakarta,	232.394 terkonfirmasi,	6.128 meninggal,	226.012 sembuh.
7. Kalimantan Timur,	215.554 terkonfirmasi,	5.824 meninggal,	209.672 sembuh.
8. Bali,	173.775 terkonfirmasi,	4.908 meninggal,	168.732 sembuh.
9. Sumatera Utara,	164.427 terkonfirmasi,	3.397 meninggal,	160.856 sembuh.
10. Riau,	155.330 terkonfirmasi,	4.560 meninggal,	150.723 sembuh.

UU IKN Direvisi

Otoritas Diberi Hak Pengaturan Tanah dan Uang

JAKARTA - Komisi II DPR bersama pemerintah menggelar rapat kerja terkait revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), Senin (21/8/2023). Dalam rapat itu juga sekaligus membentuk panitia kerja (panja). Ada 9 poin pokok perubahan, salah satunya kewenangan otorita dalam pengaturan tanah dan uang.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia membuka rapat tersebut dengan memberikan pengantar. Menurutnya, rapat ini akan digelar singkat yang diakhiri pembentukan Panja Revisi UU IKN. "Rapat kerja untuk membahas rancangan UU hari ini rapatnya tidak perlu terlalu lama. Karena yang pertama adalah, pengantar ketua rapat, ini sedang berlangsung. Kemudian meminta kepada pemerintah untuk melakukan penjelasan pemerintah atas RUU ini. Kemudian nanti ada penyerahan draf RUU. Kemudian nanti kita sepakati untuk pembentukan Panja," kata Doli membuka rapat di ruang rapat Komisi II DPR, Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

Terpisah, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan alasan pemerintah memasukkan status kewenangan khusus dalam revisi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Yang pertama soal kewenangan otorita, kemudian yang kedua soal tanah, ketiga adalah soal pembangunannya. Tapi inti dari semua itu adalah bentuk kewenangan," kata Suharso se usai rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/8/2023).

Sebelumnya, pemerintah yang diwakili oleh 5 menteri, yakni Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, Kemenkum HAM, dan Otorita IKN resmi memulai pembahasan mengenai perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Dalam draft revisi tersebut, pemerintah salah satunya mengusulkan perubahan mengenai kewenangan khusus kepada IKN. Kewenangan khusus itu sebelumnya sudah pernah diatur dalam Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara yang diteken Presiden Jokowi dan diundangkan pada 15 Mei 2023.

Kewenangan khusus Otorita IKN termasuk antara lain pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta



Rapat Kerja Komisi II DPR dan pemerintah mengenai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Senin (21/8/2023). (ist)

pengembangan ibu kota nusantara dan daerah mitra.

Suharso mengatakan pemerintah merasa perlu memperbaiki pemberian kewenangan khusus tersebut. Menurut dia, pemberian kewenangan itu akan mencakup soal pengaturan hak atas tanah, soal keuangan, mengenai anggaran dan kepemilikan aset. "Itu semuanya berubah. Jadi intinya adalah di kewenangan," kata dia.

Dia mengatakan pemerintah memang sudah mengeluarkan peraturan mengenai kewenangan khusus tersebut. Maka itu, kata dia, dengan dimulainya pembahasan revisi ini, aturan tersebut akan diperbaiki juga. Dengan perubahan yang ini tentu akan diperbaiki, dan sesungguhnya banyak hal di dalam Perpres itu yang kita adopsi ke dalam UU," kata dia.

Diharapkan Tepat Waktu

Suharso menjelaskan bahwa konsep perubahan UU IKN yang baru diarahkan agar pemindahan ibu kota dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai perencanaan.

Konsep yang terkandung dalam perubahan UU IKN antara lain yang pertama, penguatan kedudukan kelembagaan OIKN sebagai Penyelenggara

lenggara Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan IKN, serta Penyelenggara Pemdasus IKN (4P) melalui penyempurnaan ketentuan mengenai kewenangan khusus OIKN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.

"Kedua, memberikan kejelasan terhadap status tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat setempat termasuk pengaturan tanah yang bersifat *lex specialis* di IKN dalam mendukung investasi. Ketiga, memberikan kepastian hukum atas keberlanjutan kegiatan 4P, serta pengaturan dalam rangka percepatan pembangunan di IKN," pungkasnya.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul mengatakan, pihaknya telah menerima Surat Presiden (Surpres) revisi UU 3/2022 ini tepat sebelum masa reses. DPR akan mulai rapat lagi tanggal 16 Agustus, kemudian masuk masa sidang dari 16 Agustus sampai 3 Oktober 2023. "Jadi kita semua berharap agar paling lambat 3 Oktober RUU itu selesai. Karena kalau lewat dari itu, bapak-ibu tahu semua, kesibukan semakin banyak," katanya dalam diskusi panel di acara Konsultasi Publik RUU Perubahan UU IKN yang disiarkan virtual, Jumat (4/8/2023). (wid,rls,ant/dya)

9 POIN REVISI UNDANG-UNDANG IKN

1. Kewenangan khusus,
2. Pertanahan,
3. Pengelolaan keuangan,
4. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama,
5. Pemutakhiran deliniasi wilayah,
6. Penyelenggaraan perumahan,
7. Tata ruang,
8. Mitra kerja OIKN di DPR,
9. Jaminan keberlanjutan

URGENSI REVISI UU IKN

- Mempercepat persiapan pembangunan dan pemindahan IKN.
- Mengoptimalkan peran Otorita IKN yang akan menjadi kepala pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara.
- Mengoptimalkan peran Otorita IKN yang akan menjadi kepala pemerintahan daerah khusus IKN Nusantara.



Berjuang untuk Nelayan, Kepala DKP Jatim Isa Anshori: Wujudkan Keadilan Pemanfaatan Ruang Laut 0-12 Mil

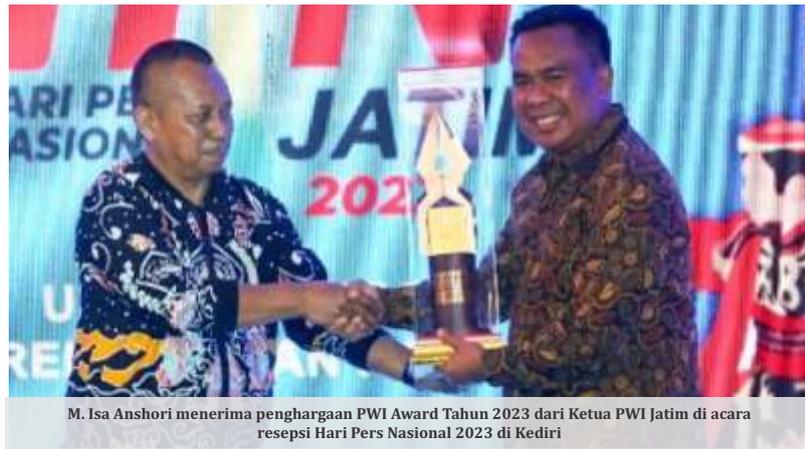
SURABAYA- Merealisasikan tata ruang laut sehingga tercipta keadilan pemanfaatannya, merupakan upaya untuk memaksimalkan potensi laut di Jatim. Langkah ini diyakini mampu mensejahterakan rakyat, setidaknya bagi masyarakat pesisir dan para nelayan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur M Isa Anshori pun berkomitmen untuk mewujudkannya.

Usai membahas secara tuntas dalam seminar tentang tata ruang laut bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Plt Direktur Perencanaan Ruang Laut Suharyanto saat rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2023 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, Isa Anshori menggagas rapat koordinasi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan se-Indonesia.

Dibeberkannya, dalam rangka Optimalisasi Kewenangan Pengelolaan Laut 0-2 Mil, memang masih ditemukan banyak masalah, khususnya di daerah. Masalah ini akibat Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

"Atas dasar itu, maka diselenggarakan Rapat Koordinasi Teknis, agar ditemukan berbagai solusi terbaik, termasuk apa saja kontribusi yang bisa diperoleh pemerintah daerah dengan diberlakukannya Peraturan Menteri No 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut" tegasnya

Diketahui, Isa Anshori memang baru menjabat sebagai Kepala DKP. Pria kelahiran Bangkalan ini dilantik pada 1 Desember 2022. Sebelumnya, ia menjabat Kepala Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jatim selama 2 tahunan. Namun dalam waktu yang singkat ia telah mampu melakukan hal



M. Isa Anshori menerima penghargaan PWI Award Tahun 2023 dari Ketua PWI Jatim di acara resepsi Hari Pers Nasional 2023 di Kediri

spetakuler di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jatim.

Di awal ia menjabat, akhir tahun 2022 Isa langsung melakukan bersih-bersih sampah di Kawasan Konservasi Perairan Pulau Gili Ketapang dengan melibatkan 200 orang nelayan dan masyarakat tempat. Selanjutnya dilakukan penanaman pohon mangrove dan cemara udang.

Masih di akhir tahun 2022 DKP Jatim juga menyalurkan bantuan dampak kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk 16.500 orang nelayan. Nilai bantuan hampir Rp 10 miliar. "Bantuan uang tunai itu sangat berarti bagi nelayan, meski hanya Rp 600 ribu tiap nelayan," ujar Isa.

Pria kelahiran 16 September 1970 ini juga menjelaskan, akibat Covid-19 yang berlangsung antara 2020 - 2022, banyak intervensi dilakukan Pemprov untuk menaikkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di sektor perikanan.

Beberapa hal dilakukan diantaranya dengan program Padat Karya. Di lingkungan DKP dilakukan bersih-bersih pantai, bersih-bersih karang laut termasuk sampah, bersih-bersih kampung nelayan. "Jadi kita

gerakkan nelayan untuk melakukan pekerjaan itu kemudian kita beri upah,"ujarnya.

Ada juga pelestarian sumberdaya ikan. Agar ikan tidak semakin menjauh dari pantai maka dibuatkan Rumah Ikan dekat pantai. Ada juga yang namanya Apartemen ikan, seperti keramba yang ditenggelamkan ke laut. Di dalam apartemen itu diberi ikan kecil-kecil yang mengundang ikan besar untuk masuk. "Jadi nelayan tidak lagi mencari ikan, tapi menangkap ikan. Dan usaha ini berhasil,"kata Isa.

Pekerjaan Rumah (PR) bagi Isa juga masih terus digarap. Seperti memberi stimulan kepada nelayan dengan memberi sejumlah bantuan alat bantuan ikan, alat tangkap penyu, serta kegiatan rehabilitasi mangrove dsb. Di DKP Jatim juga ada konsep Tanam - Petik - Olah - Kemas - Jual. Mekanismenya, DKP memberi bantuan benih, setelah besar diberi bantuan alat tangkapnya. Setelah itu olah, alat pengolahannya juga dibantu. Lalu, kemas, alat packingnya juga dibantu. Dan terakhir jual, pemasarannya dibantu. "Kita punya aplikasi namanya Fish Info,"ujar Isa.

Fish Info Jatim merupakan

platform penyedia layanan informasi perikanan berupa data Harga Ikan (Fish Price), ketersediaan ikan (Fish Stock), Informasi jenis ikan budidaya (Fish Pedia), Lokasi Pemasaran Hasil Perikanan (Fish Trade), E-Katalog Produk (Fish Product) serta informasi Sarana Rantai Dingin/Cold Stroge (Fish Stroge) yang tersebar di Jawa Timur.

Inovasi ini memberikan data yang up to date, dan dapat diakses masyarakat luas. "Masyarakat yang mau tahu harga ikan, dikabupaten mana, stoknya berapa, bisa lihat di aplikasi ini. Update tiap minggu karena harganya harga pasar,"terang Isa.

Isa Anshori mengatakan, tantangan berat yang dihadapi saat ini adalah nilai tukar nelayan rendah. Para nelayan terjebak oleh pengijon. Program Isa Anshori ke depan, akan ajak pihak perbankan ke pelabuhan. Dengan demikian nelayan tidak terjebak lagi oleh rentenir. "Kalau mereka takut saya minta pengawalan polisi,"kata Isa. Isa mengaku sedang menggagas untuk melakukan kerjasama dengan pihak Bank Jatim membuka gerai di pelabuhan. Meski diketahui pinjaman lewat bank juga berbunga, tapi masih terukur.

Tak kalah penting, Isa punya program membangun SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) tandingan. Pasalnya, saat ini SPBN yang ada sekarang kerap menjual di atas harga subsidi. Isa menyadari bahwa permainan harga BBM ini adalah perbuatan mafia minyak.

Isa berharap bisa membangun SPBN lewat BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) kabupaten setempat. Hal ini dilakukan agar tidak dimonopoli oleh satu untuk SPBN milik perusahaan migas dan Pertamina. Menurutnya program ini sudah jalan, bahkan Kabupaten Gresik sudah mengajukan untuk penempatan SPBN di 5 lokasi, termasuk di Bawean. (ADV)

Imbas El Nino, Pendapatan Petani Anjlok hingga 26 Persen

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan fenomena El Nino ini akan berlangsung cukup panjang hingga akhir Desember 2023. Siklus El Nino yang mestinya terjadi setiap 3 -7 tahun pun sekarang menjadi lebih singkat, yakni 2-5 tahun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan dampak cuaca ekstrem El Nino terhadap pertanian di Indonesia. Menurutnya, fenomena alam ini berimbas pada penurunan produksi hingga merosotnya pendapatan petani.

Suharso Monoarfa mengatakan

Organisasi Pangan Dunia (FAO) memproyeksikan potensi penurunan produksi padi di Indonesia akibat El Nino sebesar 1,13- 1,89 juta ton. "Sehingga akan menurunkan pendapatan petani 9 hingga 26 persen," tutur Suharso Monoarfa di kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2023).

Ia menjelaskan perubahan iklim menyulitkan petani dalam menentukan waktu tanam. Pasalnya, kondisi itu membuat pergeseran awal dan puncak musim hujan. Indonesia sendiri diperkirakan akan mengalami penurunan tingkat curah hujan sebesar 1 sampai 4 persen hingga 2034 jika dibandingkan dibanding

pada 1995-2010.

Hal itu, menurut Suharso Monoarfa, mengakibatkan pasokan air bersih semakin berkurang. Selain itu, juga berpotensi menimbulkan konflik alokasi air, terutama untuk pertanian, industri, dan energi.

Karena itu, ia menilai pemerintah harus segera memitigasi fenomena alam El Nino. Khususnya terhadap kelangkaan air, potensi kebakaran hutan dan lahan, serta menurunnya produktifitas pangan.

Sebelumnya, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan bencana kekeringan yang merupakan dampak dari El Nino bakal mencapai puncaknya pada akhir Agustus ini.

Menurut Dwikorita Karnawati, hal ini bakal membuat dampak dari El Nino semakin terasa di wilayah Indonesia.

Dwikorita Karnawati menyebut puncak musim kemarau tidak akan terjadi serentak di Indonesia. Kekeringan tersebut bakal dimulai dari wilayah Barat dan berangsur-angsur ke wilayah Selatan sepanjang bulan September.

Namun, Dwikorita Karnawati menyebut intensitas fenomena El Nino yang terjadi di Indonesia terbilang rendah. Sebab, Indonesia dikelilingi oleh laut. Berbeda dengan yang terjadi di negara lain seperti India, Thailand, dan Vietnam yang lebih parah. (dya,rls,ant/dya)

Serahkan 3.525 SK PPPK, Gubernur Khofifah Tekankan Pentingnya Sinergi dan Kolaborasi



Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan secara simbolis pada 12 PPPK dalam acara yang digelar di Graha Unesa, Senin (21/8/2023).

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya sistem kerja sinergi dan kolaborasi kepada 3.525 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru saja menerima SK. Sistem kerja tersebut guna mewujudkan birokrasi yang kompetitif dan berprestasi menuju Indonesia Emas 2045.

Sebanyak 3.525 PPK tersebut menerima Surat Keputusan (SK) PPPK di lingkungan Pemprov Jatim. Pemberian SK oleh Gubernur Khofifah ini dilakukan di Graha Unesa, Surabaya, Senin (21/8/2023). "Sekali lagi saya tekankan, sinergi dan kolaborasi. Mudah-mudahan tambahan 3.525 PPPK ini menambah penguatan di semua sektor terutama pendidikan dan kesehatan yang mendapat formasi cukup besar," katanya.

Menurut Khofifah, di tengah era disrupsi ini, masalah pemerintahan terjadi di lintas sektor dan lintas disiplin. Sehingga, saat ini bukan saat yang tepat untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi.

"Tidak ada lagi ego sektoral, ego dinas, ego ilmu maupun kepakaran. Semua harus siap bersinergi dan berkolaborasi," tegasnya.

Khofifah menambahkan, kapasitas kompetensi serta kemampuan ASN dalam beradaptasi menjadi sangat penting. Sebab, masalah tidak dapat diselesaikan dengan satu dinas, satu profesi dan satu sektor melainkan kolaborasi multi sektor.

"Kolaborasi perlu kita lakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara inklusif," imbuhnya.

Kerja kolaborasi dan sinergitas ini, lanjut Khofifah telah dibuktikan dengan sederet prestasi yang didapatkan Pemprov Jatim. Baik di bidang ekonomi, pendidikan,

investasi, hingga bidang pertanian dan perikanan. Meski begitu, dirinya mengingatkan keberhasilan ini bukan kerja satu orang melainkan kerja seluruh pihak baik vertikal maupun horisontal.

"Semoga PPPK yang baru diangkat ini menjadi suntikan semangat baru bagi Pemprov Jatim untuk mewujudkan birokrasi yang berdaya saing dan berprestasi menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan bahwa jumlah formasi rekrutmen PPPK tahun 2022 yang dibutuhkan sebanyak 3.811 orang. Rinciannya terdiri dari tenaga kesehatan sebanyak 919 formasi, tenaga pendidikan 2.450 formasi dan tenaga teknis 442 formasi.

Dari kebutuhan formasi tersebut, kata Khofifah, yang terisi 3.525 orang dengan rincian 857 tenaga kesehatan, 260 tenaga teknis, dan 2.408 tenaga pendidik. Dengan demikian, formasi yang belum terisi sejumlah 286 orang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) nomor 571 tahun 2023 dalam pemenuhan kebutuhan formasi yang kosong dan percepatan penyelesaian THK II dan Non ASN dengan prioritas, peserta eks THK II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) BKN.

"Jika masih terdapat formasi yang kosong, maka akan diisi peserta non ASN (selain eks THK-II) yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamar saat pendaftaran PPPK Teknis 2022 dan sudah diverval oleh instansi," katanya.

Saat ini, Khofifah menyebut jumlah pegawai Pemprov Jatim sejumlah 77.930 orang yang terdiri dari CPNS 18 orang, PNS 42.018 orang dan PPPK 13.073 orang. Sedangkan pegawai Non ASN sejumlah 22.821 orang.

Jika diklasifikasikan berdasarkan generasi, jumlah pegawai yang masuk

generasi milenial di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejumlah 32% atau sebesar 17.620 orang.

Dari jumlah tersebut, pegawai PPPK yang berasal dari generasi milenial tidak sekadar mewujudkan birokrasi kompetitif dan berprestasi, melainkan turut memiliki andil mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Bila kita bisa mengelola generasi milenial dengan baik, kita yakin bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menjadi Pemprov yang kompetitif dan berprestasi serta ikut andil menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

"Saya meyakini bahwa memahami karakteristik generasi milenial memiliki potensi dahsyat pada peningkatan kinerja para Kepala Perangkat Daerah," katanya.

Lebih lanjut, manajemen SDM juga harus berubah. Tidak hanya fokus

untuk mencukupi kebutuhan pegawai dari sisi jumlah saja, namun juga harus menitikberatkan kecukupan dari sisi kompetensi.

"Sekali lagi selamat bagi anda semua yang berhasil lolos seleksi PPPK Formasi Tahun 2022, anda orang-orang terbaik dan terpilih untuk menjadi abdi negara dan abdi masyarakat. Serta garda terdepan pelayanan kepada masyarakat, perkuat persatuan dan kesatuan bangsa," tutupnya.

Sementara itu, Novita (36) salah satu penerima SK PPPK asal Probolinggo menyampaikan perasaan bahagia lantaran telah menunggu momen ini selama hampir 2 tahun setelah lolos CAT di tahun 2021. Ia bersyukur akhirnya menerima SK PPPK dari Gubernur Khofifah setelah 11 tahun mengabdikan di SMK Negeri 1 Gending Kab. Probolinggo.

"Terimakasih banyak Ibu Gubernur, sudah memberi kesempatan istimewa ini kepada kami, Semoga provinsi Jawa Timur semakin Jaya," kata Novita.

Hal senada disampaikan Rio Sabri Nauval Samudra (42). Ia mengaku bersyukur dan bangga menerima SK PPPK yang selama ini di idam-idamkan sebagian besar pegawai honorer. Sebelumnya ia bekerja di Dinas Sosial Jatim sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) selama 14 tahun.

"Sangat senang sekali, mudah-mudahan ini menjadi pijakan awal untuk lebih baik berkarya di dunia pemerintahan melayani masyarakat. Semoga kedepan akan ada penyetaraan tunjangan PPPK dengan PNS, sehingga kesejahteraan pegawai semakin merata," ungkapnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, antara lain Kepala Kanreg II BKN Mohammad Ridwan, Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni, dan beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim. (Lut/dya)



Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa foto bersama dengan 3.525 pasien PPPK dalam acara yang digelar di Graha Unesa.



VALERINA DANIEL

BANGGA MEMANDU ACARA DI ISTANA

Foto-foto : Dok.Valerina Daniel

VALERINA Daniel mengungkapkan kegembiraan dan kebanggaannya dipercaya sebagai pembawa acara pada perayaan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2023).

Pakaian adat Minang pun dipilih perempuan yang berayah ibu dari Sumatera Barat tersebut.

"Saya bangga dapat mengenakan pakaian adat perempuan asal Minangkabau yang penuh makna. Misalnya, suintang harus disusun bertingkat dalam jumlah ganjil karena kegenapan atau kesempurnaan adalah milik Allah SWT," ujar Valerina yang merupakan None Jakarta 1999 dan runner up Puteri Indonesia 2005 itu.

Suintang -atau perhiasan keemasan di atas kepala—yang digunakan Valerina kali ini beratnya 2 kilogram. Namun, dia tidak keberatan menyangganya.

Sebab, ketika menikah, ia pernah mengenakan suintang dengan tingkat lebih tinggi dan lebih berat.

Valerina menuturkan, pakaian adat yang dikenakannya saat membawakan acara di Istana Merdeka tersebut biasa digunakan untuk acara pernikahan.

Hal ini tergambar dari warna merah yang mengandung makna kemewahan dan keagungan.

Sulaman benang berwarna emas pada baju kurung dan kain sarung tenun asal Silungkang mengisyaratkan budaya Sumatera Barat yang sangat demokratis.

Valerina memulai karier sebagai jurnalis atau news anchor (pembawa acara berita) sejak kuliah tingkat II di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia.

Pengalamannya didapat sebagai pembawa acara pada HUT Ke-78 Kemerdekaan RI dinilai oleh Valerina sebagai momen penting sepanjang dua dekade masa kariernya sebagai jurnalis.

"Senang dan bangga bisa ikut berperan dalam acara bersejarah bagi bangsa Indonesia setelah tahun 2022 dipercaya menjadi pembawa acara G20 Summit di Bali yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan dihadiri para pemimpin kekuatan ekonomi dunia," tutur Valerina.

Melalui busana adat, Valerina bersama semua hadirin peringatan HUT RI di Istana Merdeka ikut mempromosikan keberagaman budaya Nusantara. Valerina yang di tahun 2018-2020 diberi amanat menjadi Tenaga Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Ketua Tim Percepatan Pariwisata Berkelanjutan ini pun memiliki asa tersendiri untuk terus memajukan budaya Indonesia.

"Kalau bukan kita, siapa lagi?" ujarnya.

Profil

Perjalanan karier Valerina Daniel -kelahiran lahir 25 November 1978, dimulai sejak dia didaulat sebagai None Jakarta pada 1999. Sebelum itu, ia memiliki kisah dan alasan tersendiri hingga dia ingin mendaftar. Bukan ingin menunjukkan kecantikan saja,

tapi ia mengaku ingin berkontribusi untuk Indonesia.

Saat SMA, Valerina pernah mengikuti program pertukaran pelajar American Field Service (AFS) pada 1996--1997. Ia mengaku selama menjalankan program tersebut, banyak diminta presentasi dan menceritakan tentang Indonesia.

Satu kejadian yang membekas dan membulatkan tekad perempuan kelahiran 25 November ini untuk lebih mempromosikan Indonesia adalah ada rekannya yang menganggap Indonesia adalah negara yang sangat terbelakang.

"Pada saat itu kan baru saja terjadi krisis moneter. Jadi, Indonesia imagenya mungkin masih sangat terbelakang. Saya tuh ditanyain 'apakah kamu masih tinggal di pohon?'. Jadi tuh kita dianggap negara yang terbelakang sekali. Dari situ makanya saya bercita-cita, saya harus kontribusi buat Indonesia apapun bentuknya sesuai kemampuan saya," ungkapnya.

Kembali ke Indonesia, Valerina mencoba untuk mendaftarkan diri menjadi dalam ajang Abang None Jakarta 1999. Dalam bukunya, tujuan dia daftar adalah ingin berkontribusi untuk Indonesia, dimulai dari Jakarta. Melewati berbagai seleksi, dia terpilih menjadi None Jakarta kala itu.

Mulai dari sana, kecintaannya terhadap dunia jurnalistik tumbuh. Meskipun mengambil jurusan kuliah Hubungan Internasional, Valerina mulai tertarik dengan jurnalistik saat dia diminta untuk menemani wawancara direktur eksekutif UNICEF dalam rangka Hari Anak Internasional.

Mencoba peruntungan, Valerina mendaftarkan diri ke sebuah stasiun televisi nasional. Tak disangka, dia terima dan bekerja menjadi jurnalis paruh waktu karena masih menjalani kuliah di tahun kedua.

Istri Febby Andryananto ini menyebut dalam bukunya bahwa profesi jurnalis membawanya melihat berbagai hal penting, seperti tsunami Aceh 2004 hingga pembalakan liar di Riau pada 2006 (kompas-berbagai sumber)

"Saya bangga dapat mengenakan pakaian adat perempuan asal Minangkabau yang penuh makna. Misalnya, suintang harus disusun bertingkat dalam jumlah ganjil karena kegenapan atau kesempurnaan adalah milik Allah SWT,"



MAKANAN INI AMPUH KURANGI PERADANGAN SECARA ALAMI



Ikan



Berbagai Buah



Kunyit



Jahe

PERADANGAN atau inflamasi adalah sistem pertahanan tubuh saat terjadi infeksi oleh bakteri atau virus dan saat bagian tubuh mengalami cedera.

Meskipun demikian, peradangan bisa terjadi selama beberapa hari tanpa adanya infeksi atau luka.

Saat peradangan terjadi bukan karena infeksi atau cedera, peradangan tersebut menjadi penyakit tersendiri.

Peradangan bisa menyebabkan perasaan tidak enak badan hingga mengarah ke kondisi yang lebih serius.

Beberapa penyakit yang berkaitan dengan peradangan kronis adalah penyakit jantung, diabetes, depresi, hingga Alzheimer's.

Mengatasi peradangan bisa dilakukan melalui obat-obatan. Namun, radang juga bisa disembuhkan secara alami menggunakan berbagai jenis makanan yang memiliki efek anti-inflamasi, seperti dikutip dari Harvard School of Public Health (15/8/2023).

Dilansir dari berbagai sumber

(15/8/2023), berikut adalah makanan yang ampuh mengurangi peradangan secara alami:

1. Tomat

Tomat secara alami mengandung likopen dan juga kaya akan vitamin C. Kandungan ini bermanfaat untuk mengurangi peradangan.

2. Minyak Zaitun

Minyak zaitun mengandung oleocanthal, senyawa yang memiliki efek yang sama dengan obat anti-inflamasi seperti ibuprofen.

Mengonsumsi minyak zaitun dalam jumlah wajar bisa menjadi cara mengurangi peradangan secara alami.

3. Sayuran Hijau

Sayuran hijau kaya akan nutrisi seperti vitamin, mineral, dan antioksidan. Kandungannya ini bisa menghalau peradangan sekaligus meningkatkan imun dan kesehatan secara umum. Sayuran hijau yang

bagus dikonsumsi adalah bayam, kale, brokoli, dan sawi.

4. Kacang

Kacang-kacangan seperti almond dan kacang kenari adalah sumber lemak nabati dan antioksidan. Kacang-kacangan ini bisa membantu tubuh secara alami mengurangi peradangan.

5. Ikan

Ikan yang mengandung banyak lemak seperti salmon, ikan kembung, dan sarden kaya akan asam lemak omega-3.

Kandungan ini bisa membantu mengurangi peradangan dan mengurangi risiko penyakit kronis akibat peradangan.

6. Berbagai Macam

Buah Beberapa buah memiliki khasiat anti-inflamasi, seperti stroberi, bluberi, rasberi, ceri, dan jeruk. Buah-buahan ini kaya akan antioksidan dan bisa meningkatkan fungsi imun tubuh.

7. Kunyit

Kunyit adalah bahan pangan yang kaya akan Curcumin yang memiliki kandungan anti-inflamasi dan antioksidan. Mengonsumsi sedikit kunyit yang dicampurkan ke dalam makanan atau minuman berkhasiat meredakan peradangan dan bengkak pada tubuh.

8. Jahe

Jahe mengandung Gingerol, senyawa yang mampu meredakan peradangan dan menghalau radikal bebas. Jahe bisa dikonsumsi dalam bentuk teh seduhan atau dikonsumsi langsung.

Selain mengonsumsi makanan anti-inflamasi, Anda juga bisa menjaga pola makan dengan mengurangi makanan yang justru memperburuk peradangan.

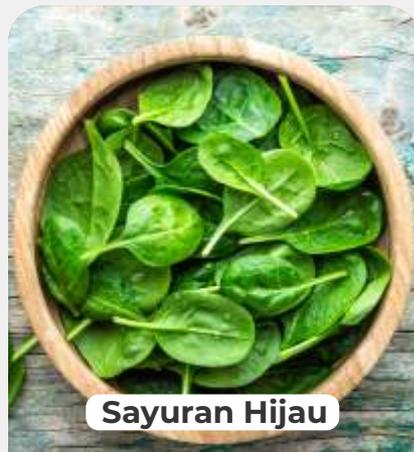
Makanan yang sebaiknya dihindari selama peradangan adalah karbohidrat olahan seperti roti, gorengan, soda dan minuman manis, daging merah olahan, dan margarin (bisnis)



Tomat



Minyak Zaitun



Sayuran Hijau



Kacang

HONDA DAN PERTAMINA KERJA SAMA RISET MOBIL LISTRIK KOMERSIL

PT Honda Prospect Motor (HPM) menjalin kerja sama dengan Pertamina Patra Niaga dan Pertamina New Renewable Energy untuk menjalankan riset penggunaan mobil listrik untuk kegiatan niaga di perkotaan.

Melalui kerja sama ini, Honda akan menyediakan 1 unit Honda N-VAN EV Prototype, sebuah prototipe mobil listrik terbaru dari Honda, untuk mendukung mobilitas pengantaran barang dari gudang ke unit-unit Bright Store di area Jakarta dan sekitarnya.

Hal ini sekaligus mendorong utilisasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang saat ini sudah tersedia di sejumlah SPBU Green Energi Station di wilayah Jakarta.

"Harapannya, melalui penggunaan electric 4-wheeler jenis mobil angkut barang, dapat menciptakan efisiensi sekaligus berkontribusi pada pengurangan emisi dalam operasional bisnis Non-Fuel Retail kami. Serta ke depan mendorong pelaku industri lainnya dalam mengutilisasi SPKLU atau charging station di SPBU Green Energy Station Pertamina," ujar Riva, di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIAS) 2023, ICE BSD.

Tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk mengumpulkan data dan pengalaman terkait penggunaan mobil listrik, terutama dalam kegiatan komersil.

Berbagai aspek akan diteliti dalam kerja sama studi ini, termasuk reliabilitas baterai, proses pengisian ulang, serta kenyamanan dan kepraktisan mobil Honda N-VAN EV Prototype dalam kegiatan pengantaran barang di area perkotaan.

Kerja sama untuk riset ini akan berlangsung selama September hingga Desember; di mana Honda N-VAN EV Prototype akan berjalan selama enam

hari dalam seminggu mengirimkan logistik dimulai dari gudang penyimpanan barang Pertamina Retail ke 14 lokasi Bright Store di area Jakarta dan sekitarnya.

Hasil riset ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi mobil listrik sebagai solusi ramah lingkungan dan efisien untuk kegiatan logistik dan distribusi.

"Studi yang kami lakukan dengan Honda N-VAN EV Prototype bertujuan untuk memahami kebutuhan konsumen dan infrastruktur di Indonesia, sebagai bagian dari persiapan implementasi visi elektrifikasi Honda di Indonesia," kata Shimizu, President Director PT HPM Kotaro Shimizu.

Pihaknya mengapresiasi dukungan dari Pertamina sebagai salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang memiliki visi sejalan dengan Honda untuk menciptakan teknologi yang ramah lingkungan di masa mendatang.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina New & Renewable Energy Dannif Danusaputro Dannif Danusaputro menambahkan, kerja sama ini akan menjadi tonggak sejarah strategis karena Pertamina NRE juga memiliki fokus pada pengembangan ekosistem baterai dan kendaraan listrik dalam portofolio bisnisnya.

"Kami sangat menyambut baik kolaborasi yang positif antara Pertamina dan Honda. Saat ini pun Pertamina NRE berpartisipasi

dalam ekosistem baterai dan kendaraan listrik melalui Indonesia Battery Corporation. Kami percaya bahwa kolaborasi berbagai pihak akan mempercepat terbangunnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia," kata dia.

Honda N-VAN EV Prototype yang digunakan dalam riset ini merupakan pengembangan dari model mobil Honda N-VAN, salah satu model kendaraan komersial yang sukses dari Honda.

Pertama kali diperkenalkan di pasar Jepang pada tahun 2018, N-VAN banyak digunakan bukan hanya untuk

penggunaan pribadi, tetapi untuk memenuhi kebutuhan mobilitas dalam kegiatan bisnis dan niaga, terutama dalam hal pengantaran barang.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap lingkungan, Honda telah menetapkan visi untuk mewujudkan netralitas karbon untuk semua produk dan aktivitas perusahaan pada tahun 2050.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Honda berencana memperkenalkan hingga 30 mobil berbasis listrik secara global pada tahun 2030, dengan volume produksi mencapai 2 juta unit setiap tahunnya (Ant)



**HONDA N-VAN
EV PROTOTYPE**

HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | MOJOKERTO: RAHMAD SURYADI | GRESIK-LAMONGAN: ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK: GATOT SUNARKO | TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI): IMAN SANTOSO, | MADIUN: IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA | TRENGGALEK: ANNGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO | SEKERTARIS ISTIDHA NUR AMANAH,

DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | TELP 03187854491 | PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | TELP IKLAN 031-87854491 | NIB 91205006801134 | HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenalan wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenalan wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenalan atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.



DAFTAR NEGARA PALING BEBAS POLUSI UDARA

POLUSI udara merupakan kondisi yang serius di dunia. Udara di beberapa negara terbilang buruk, termasuk Indonesia, tetapi juga ada negara yang memiliki udara yang baik.

Dilansir dari UNEP, polusi udara adalah ancaman lingkungan terbesar bagi kesehatan masyarakat secara global dan menyumbang sekitar 7 juta kematian dini setiap tahun.

Semua polutan utama berdampak pada iklim dan sebagian besar berbagi sumber yang sama dengan gas rumah kaca.

Meningkatkan kualitas udara kita akan membawa manfaat bagi kesehatan, pembangunan, dan lingkungan.

Sebuah laporan mengenai kualitas udara di dunia yang dilakukan IQAir meninjau status kualitas udara di seluruh dunia untuk 2022.

Laporan ini menyajikan data kualitas udara PM2.5 dari 7.323 kota di 131 negara, wilayah, dan teritori.

Data yang digunakan dalam laporan ini dikumpulkan dari lebih dari 30.000 stasiun pemantauan kualitas udara resmi dan sensor kualitas udara berbiaya rendah.

Dilansir dari ABC News, menurut Departemen Kesehatan NYS, PM2.5 adalah partikel halus yang merupakan polutan udara yang dapat membahayakan kesehatan manusia ketika

kadarnya tinggi.

Saat tinggi, partikel tersebut dapat menurunkan jarak pandang dan membuat udara tampak berkabut.

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa hanya ada 13 negara, teritori, dan wilayah secara global yang memenuhi pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk kualitas udara yang sehat tahun lalu.

Menurut laporan tersebut, negara-negara yang telah mencapai target kualitas udara pedoman PM2.5 atau lima mikrogram per meter kubik atau kurang.

Sementara itu, 118 negara, atau sekitar 90%, tidak memenuhi pedoman kualitas udara yang direkomendasikan WHO.

Pedoman kualitas udara WHO, diterapkan pada tahun 2021, dibuat untuk pemerintah di seluruh dunia untuk digunakan sebagai target untuk mengurangi polusi udara dan pada akhirnya meningkatkan kesehatan masyarakat, kata organisasi itu.

Dilansir dari World Population Review, adapun Indeks Kinerja Lingkungan (EPI) yang mengukur 32 indikator kinerja di 11 kategori yang terkait mengenai negara terbersih di dunia. Kategori ini meliputi kualitas udara, air dan sanitasi, keanekaragaman hayati dan habitat, dan keberlanjutan (Bisnis)



BERIKUT DAFTAR NEGARA DENGAN TINGKAT POLUSI UDARA PALING MINIM ATAU BEBAS POLUSI

- | | | | |
|--|----------------------|---|-----------------------------|
|  | 1. Australia |  | 8. Guam |
|  | 2. Bermuda |  | 9. Islandia |
|  | 3. Bonaire |  | 10. Kaledonia Baru |
|  | 4. Estonia |  | 11. Selandia Baru |
|  | 5. Finlandia |  | 12. Puerto Rico |
|  | 6. Polinesia Prancis |  | 13. Sint Eustatius dan Saba |
|  | 7. Grenada |  | 14. Kepulauan Virgin AS |

Megawati ke (dari hal 1)

KETUA Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri bercerita dirinya pernah menyarankan agar KPK dibubarkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Megawati KPK tidak efektif.

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh, bubarin aja KPK itu pak, menurut saya enggak efektif. (Jokowi) Ibu nih kalau ngomong ces pleng," kata Megawati disela-sela acara BPIP di The Tribra Darmawangsa, Senin (21/8/2023).

Ia mengatakan bahwa KPK dibentuk saat masa pemerintahannya. Ia juga menyebut hal yang sama untuk Mahkamah Konstitusi (MK) dan polisi yang dipisah dari ABRI.

Megawati mengatakan bahwa korupsi tetap ada walaupun KPK berdiri. Menurut dia penegak hukum tidak menjalankan hukum yang sudah dibuat di Indonesia. "Kalian pergi lah ke bawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau enggak kelihatan," katanya.

Diketahui, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami penurunan skor dari 38 pada 2021, menjadi 34 pada 2022. Skor itu menempatkan Indonesia pada posisi 110 dari 180 negara yang dilakukan penilaian oleh Transparency International (TI)

Atas penurunan indeks persepsi sampai empat poin itu, skor IPK Indonesia 2022 itu setara dengan negara negara terbelakang seperti Sierra Leone, Bosnia-Herzegovina, Gambia, Malawi, dan Nepal. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tertinggal dari Malaysia, Vietnam, bahkan Timor Leste. Bahkan bila dibandingkan dengan Singapura yang menempati peringkat pertama dengan skor 83.

Megawati mengaku pernah menangani ratusan ribu gugatan kredit macet saat krisis. Akan tetapi, saat itu KPK dikatakannya tidak percaya bahwa kredit macet yang ditangani jumlahnya sebanyak itu dan diduga telah terjadi pemalakan. Ia lalu meminta KPK membuktikan tuduhan tersebut.

"Kredit macet itu 300 ribuan, saya disuruh nangani, setelah itu KPK sudah ada yang saya bikin sendiri. Waktu itu yang KPK ini enggak percaya katanya mana mungkin 300 ribuan kredit macet itu digugat, malak pengusaha-pengusaha ini, kata Megawati.

"Saya kira KPK sini dong buktinya kalau saya malak, ini dunia modern, saya mau naruh uangnya di mana, emangnya dikarung?" katanya lagi.

Megawati Soekarnoputri juga mempersoalkan lembaknya TNI dan Polri di masa sekarang ini. Padahal sebagai salah satu pihak yang berkontribusi pemisahan dua lembaga ini, Megawati berharap langkah tersebut bisa memberikan penguatan.

"Kalau negara diserang, ini saya tanya sama TNI, kok menurut saya TNI sekarang lembek, polisi lembek, waduh saya pikir itu kok piye toh yo,

tapi betul lho, pegawai negeri lembek," kata Megawati saat memberikan pidato dalam acara sosialisasi buku teks utama pendidikan pancasila itu.

Ia pun sempat menyinggung kasus Ferdys Sambo, sebagai salah satu contoh bukti lembeknya polisi. "Masa sekarang, sedih saya peristiwa Pak Sambo itu, loh betul itu, saya sebagai seorang ibu nangis, bayangkan, kemana prikemusiaannya, dan mana moral yang beradab di kepolisiannya sekarang?" ungkap dia.

Megawati mengaku heran mengapa hukuman Sambo disunat oleh MA, padahal pengadilan tingkat pertama dan banding sudah menjatuhkan hukuman mati. "Hukum Indonesia ini hukum apa ya sekarang, saya bukan orang hukum lho, tapi kan saya bisa mikir. Sudah dua pengadilan, yang tingkat pertama hukuman mati, yang kedua hukuman mati, masuk ke MA. Eh, kok pengurangan hukuman?" katanya.

Megawati mengaku tetap menghormati putusan MA tersebut, tetapi ia juga mengaku tidak habis pikir mengapa Sambo disunat hukumannya. Padahal, kata Megawati, Sambo merupakan seorang jenderal polisi yang membunuh anak buahnya sendiri.

"Kok bisa dikasih apa namanya pengurangan hukuman. Saya sampai mikir begini, anak orang begini, meskipun dia prajurit atau apa itu, apa karena nilainya hanya prajurit, hah?" kata Megawati.

Presiden kelima Republik Indonesia itu pun menekankan bahwa perwira TNI dan Polri bisa menjadi seorang jenderal karena pengorbanan prajurit-prajuritnya. Megawati mengatakan, hal itu ia alami langsung ketika ada daerah operasi militer (DOM) di Aceh yang mengakibatkan banyak prajurit gugur, tetapi tak ada satu pun jenderal yang gugur.

"Kalian jadi jenderal karena yang mati itu anak buah, saya ngalami saat DOM Aceh, daerah operasi militer Aceh, nah kurang apa lagi. Coba, saya pergi ke RSPAD, melihat siapa korban-korbannya tiap hari, saya minta bahwa yang jadi korban itu siapa saja, enggak ada jenderal yang mati!" kata Megawati.

Untuk diketahui, MA menyunat hukuman empat terdakwa kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J pada tingkat kasasi. Selain Ferdys Sambo, tiga terdakwa lainnya adalah istri Sambo, Putri Candrawathi; eks ajudan Sambo, Ricky Rizal; dan asisten rumah tangga Sambo, Kuat Ma'ruf.

Dalam kasasi, hukuman Ferdys Sambo yang merupakan eks Kadiv Propam Polri didiskon dari pidana mati pada pengadilan tingkat pertama dan diperkuat di tingkat banding diubah menjadi penjara seumur hidup.

Kemudian, hukuman Putri Candrawathi dipotong dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Demikian juga hukuman Ricky Rizal dipotong dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara. Lalu, hukuman Kuat Ma'ruf dikurangi dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Sementara itu, satu terdakwa lainnya, Bharada Richard Eliezer, kini sudah bebas bersyarat. Sebelumnya, Richard Eliezer atau Bharada E dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bharada E juga diketahui tidak melakukan banding atau kasasi atas putusan tersebut.

Megawati pun memperingatkan agar TNI-Polri tidak menjadi lembek, karena fungsinya penting untuk melindungi negara. TNI-Polri juga penting tugasnya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang makmur

"Siapa enggak ada yang berani kayak gitu jadi melempem Indonesia. Kalau kalian saja melempem, apalagi rakyatnya yang masih perlu, untuk diberi kehidupan yang baik supaya mereka sejahtera, supaya tidak ada lagi fakir miskin di Tanah Air Republik Kesatuan Indonesia," tutur Ketua PDIP itu.

Mahfud Bandingkan Era Orba

Menko Polhukam Mahfud Md membandingkan korupsi yang terjadi era orde baru dengan saat ini. Mahfud mengatakan korupsi saat ini terjadi sebelum Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dibentuk.

"Sekarang korupsi nya terjadi di sini, sebelum ke sini sudah korupsi sekarang. Mau membuat anggaran,

saudara, membuat anggaran gitu, APBN nya belum jadi udah tawar menawar. Tawar menawar sekarang," kata Mahfud saat dialog kebangsaan bertajuk Strategi Nasional di bidang Polhukam Guna Antisipasi Dinamika Politik Global di Lemdiklat Polri disiarkan secara langsung melalui YouTube, Senin (21/8/2023).

Mahfud mencontohkan salah satunya tawar menawar yang dilakukan oleh kepala daerah. Dia mengatakan kepala daerah menyuap anggota dewan agar proyek yang diinginkan diusulkan dan masuk ke dalam APBN.

"Misalnya saya gubernur, saya ingin menunjukkan kepada rakyat untuk membangun rumah sakit besar segini, lobi ke Jakarta. DPR tolong dong diusulkan, saya mau membuat rumah sakit di sana. Gubernur sana, tolong dibuat kan saya mau membuat jalan provinsi di sana. Yang sana, saya mau membuat sekolah di sana. Lobi sebelum APBN nya jadi, datang ke DPR. 'Berapa anggarannya?' 'Rp 200 miliar' 'Oke nanti saya masukan di APBN Rp 200 miliar, tapi bayar dulu sekarang 7 persen'," ujarnya.

Mahfud menjelaskan korupsi zaman Soeharto terjadi karena adanya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN). Di mana korupsi zaman tersebut menguntungkan Soeharto, keluarga beserta koleganya yang terjadi pada tingkat pelaksanaan proyek sehingga merugikan negara.

"Uangnya belum ada, ditulis aja belum, sudah disuruh bayar 7 persen. Belum jadi ini anggaran sudah dikorupsi di sini. Itu yang masuk-masuk penjara itu menyuap untuk masuk APBN. Zaman Pak Harto tuh nggak ada," ucapnya.

Mahfud menyampaikan korupsi saat ini semakin tidak terkendali. Dia mengatakan korupsi menjadi persoalan bersama. "Itu sebabnya saya katakan, korupsi sekarang semakin tidak terkendali. Sesak nafas kita tuh melihatnya. Coba saya katakan lihat ke atas tuh, oh apa itu pesawat Garuda, oh ada korupsinya itu. Lihat ke laut di Bakamla, di Basarnas korupsi lagi. Ke hutan, korupsi di hutan, ke tambang, korupsi di tambang, kesehatan, rumah sakit, korupsi di rumah sakit dengan obat-obatan. Nah ini persoalan kita sekarang urusan korupsi," imbuhnya. (wid,rls,ist/dya)

303





DPRD JATIM SAHKAN PERDA DANA CADANGAN PILGUB 2024

SURABAYA – Seluruh Fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, sepakat dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas peraturan daerah nomer 6 tahun 2022 tentang dana cadangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur untuk disahkan menjadi peraturan daerah (Perda). Pengesahan pun dilakukan dalam rapat paripurna, Senin (21/8/2023).

Dengan persetujuan tersebut, maka dana cadangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sudah bisa dicairkan pada 2023 ini sebanyak 40%. Sedangkan selebihnya baru bisa dicairkan pada tahun 2024 mendatang.

Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Basuki Babussalam mengatakan bahwa pencadangan APBD Jawa Timur untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 telah dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024.

“Fakta yuridis ini telah menandai adanya alokasi APBD untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, yakni sebesar Rp 600 Miliar. Pada saat Perda Dana Cadangan telah ditetapkan dan berlaku, terbit Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang menentukan bahwa dana hibah Pilkada sebesar 40% wajib dianggarkan dan dicairkan dalam tahun anggaran 2023,” tandasnya.

Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Dana Cadangan Pilgub menentukan bahwa dana cadangan hanya dicairkan pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dengan keadaan hukum melalui SE Mendagri, maka Dana Cadangan tidak dapat dicairkan pada tahun anggaran 2023, tetapi hanya dapat dicairkan pada tahun anggaran 2024. Fraksi PAN memahami hal demikian sepenuhnya untuk kita menyesuaikan dengan SE Mendagri dengan tujuan untuk melancarkan tahapan penyelenggaraan pemilu yang sudah dimulai pada 2023 ini. Oleh



Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama tiga Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah, Anwar Sadad, dan Ahmad Iskandar setelah menandatangani penetapan Raperda perubahan tentang dana cadangan menjadi Perda pada Rapat paripurna DPRD Jatim Senin (21/8/2023).

karena itu yang demikian dalam pandangan Fraksi PAN hanya pada aspek legalitas dan untuk mencapai tujuan tertentu, yakni dukungan dan kelancaran Pemilu,” sambungnya.

Dia menandakan bahwa fraksi PAN memahami prinsip pemilu kepala daerah yang reguler yang kemudian harus didukung pendanaan dari daerah, namun Fraksi PAN tetap menekankan prinsip efisiensi dalam penggunaan dana oleh penyelenggara pemilu, dan juga adanya pencairan pendanaan harus digunakan secara efektif dalam persiapan tahapan pemilu.

“Akhirnya dengan mengucapkan ‘Bismillahirrahmanirrahim’ Fraksi PAN DPRD Jawa Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024. Atas perhatian peserta sidang paripurna hari ini, kami ucapkan terima kasih,” pungkasnya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai NasDem, M Nasih Aschal, mengatakan bahwa Reperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang dana cadangan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024, setelah melewati proses dan kajian yang mendalam, Fraksi Partai NasDem menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut;

“Kami menyadari dan mengakui pentingnya kesiapan dana cadangan dalam konteks pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun

2024 sekaligus mengapresiasi langkah pemerintah dalam melakukan perubahan atas perda tersebut untuk memastikan kelancaran dan transparansi penggunaan dana cadangan,” katanya.

Dia juga meminta supaya Gubernur melakukan langkah konkrit dalam memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana cadangan. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui mekanisme keterlibatan publik dan informasi yang mudah diakses mengenai penggunaan dana tersebut.

“Kami mengajukan usulan agar hasil dari perubahan atas perda ini disosialisasikan secara efektif kepada masyarakat agar semua pihak memahami dan dapat berkontribusi dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang berjalan lancar dan transparan,” pungkasnya.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Jatim melalui juru bicaranya Achmad Silahuddin juga menyatakan setuju dengan penetapan Raperda tersebut menjadi Perda. Lebih lanjut dia menandakan bahwa dasar dari persetujuan karena mengingat kebutuhan dana Pilgub Jatim 2023 cukup besar. Dia menambahkan dana tersebut dialokasikan selama tiga tahun anggaran dalam APBD Provinsi Jatim.

“Maka Fraksi mendukung agar dalam perubahan APBD tahun anggaran 2023 pada pengeluaran pembiayaan, untuk dialokasikan tambahan dana cadangan sesuai

dengan pendapatan daerah dan kemampuan keuangan serta ditunstraskan pengalokasikan pada APBD tahun anggaran 2024,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2022 tentang Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2024 yang diundangkan pada tanggal 4 November 2022 lalu, di mana dana cadangan tersebut dialokasikan dalam APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 600 miliar.

“Adapun terkait pencairan, disebutkan bahwa dana cadangan hanya dicairkan pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tandasnya.

Namun, lanjutnya berdasarkan dari surat edaran Menteri Dalam Negeri yang mengatakan bahwa pencairan belanja hibah kegiatan Pemilihan Kepala Daerah untuk tahun 2023 bisa dilakukan sebesar 40 persen dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD. Sedangkan untuk tahun anggaran 2024 sebesar 60% dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Maka, lanjut gubernur, perlu adanya perubahan Perda supaya pada tahun 2023 ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat mencairkan dana cadangan sebesar 40 persen dari nilai NPHD. Nantinya dana tersebut akan dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Sementara itu, Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan besaran anggaran yang dibutuhkan pada tahun ini. Sehingga pencairan anggaran akan bisa digunakan secara maksimal.

“Kebutuhan anggaran KPU pada tahun ini kan tidak terlalu banyak. Sehingga kami bisa mengambil kembali (dana) besok. Sehingga tidak total 40 persen itu kami cairkan, namun melalui melihat kebutuhan dan disimpet saja,” kata Adhy Karyono.

Adhy Karyono menandakan bahwa ini nampaknya susah karena tinggal beberapa bulan saja. Sebab, lanjut Sekda, dia yakin jika kebutuhan Arofah Mina tidak terlalu besar pada tahun ini. (Lut/Dya/Adv)